BADAN GIZI NASIONAL *(NATIONAL NUTRITION AGENCY)*
Jalan Kebon Sirih No.1, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Jakarta, Kode Pos 10340

PENGUMUMAN
NOMOR: 001/PANSELNAS.BGN/XI/2026
TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN GIZI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2026

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 651 Tahun 2026 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Gizi Nasional Tahun Anggaran 2026 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 674 Tahun 2026 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2026, dengan ini diumumkan bahwa Badan Gizi Nasional membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan ketentuan sebagai berikut:

I. KEBUTUHAN

A. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN

Badan Gizi Nasional memperoleh alokasi kebutuhan sebanyak 1.618 (seribu enam ratus delapan belas) CPNS yang tersebar pada 15 (lima belas) jabatan dan 509 (lima ratus sembilan) rincian jabatan/unit penempatan, terdiri atas 1.563 kebutuhan umum, 33 kebutuhan khusus penyandang disabilitas, 6 kebutuhan khusus putra/putri Papua, dan 16 kebutuhan khusus *cum laude*, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kebutuhan				Jumlah Formasi
			Umum	Disabilitas	Putra/Putri Papua	*cum laude*	
1	Analis Hukum Ahli Pertama	- S-1 Hukum - S-1 Hukum Administrasi Negara - S-1 Hukum Tata Negara - S-1 Ilmu Hukum	3	-	-	4	**7**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kebutuhan				Jumlah Formasi
			Umum	Disabilitas	Putra/Putri Papua	*cum laude*	
2	Analis Kebijakan Ahli Pertama	- S-1 Administrasi Negara - S-1 Administrasi Publik - S-1 Akuntansi - S-1 Ekonomi Pembangunan - S-1 Gizi - S-1 Hukum - S-1 Ilmu Ekonomi - S-1 Ilmu Kelautan dan Perikanan - S-1 Ilmu Komunikasi - S-1 Ilmu Olahraga - S-1 Ilmu Pemerintahan - S-1 Ilmu Pertanian - S-1 Ilmu Politik - S-1 Kebijakan Publik - S-1 Kesehatan Masyarakat - S-1 Manajemen - S-1 Manajemen dan Kebijakan Publik - S-1 Manajemen Kebijakan Publik - S-1 Manajemen Logistik - S-1 Perencanaan Wilayah - S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota - S-1 Sains Data - S-1 Sistem Informasi - S-1 Statistika - S-1 Teknik Geofisika - S-1 Teknik Lingkungan - S-1 Teknologi Pangan - D-IV Gizi dan Dietetika	44	-	-	6	**50**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kebutuhan				Jumlah Formasi
			Umum	Disabilitas	Putra/Putri Papua	*cum laude*	
3	Analis Kerja Sama Ahli Pertama	- S-1 Administrasi Negara - S-1 Administrasi Publik - S-1 Hubungan Internasional - S-1 Hubungan Masyarakat - S-1 Hukum - S-1 Ilmu Komunikasi - S-1 Manajemen	2	-	-	-	**2**
4	Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama	- S-1 Administrasi Negara - S-1 Administrasi Publik - S-1 Ilmu Pemerintahan - S-1 Manajemen - S-1 Manajemen Sumber Daya Manusia - S-1 Psikologi	7	-	-	-	**7**
5	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	- S-1 Administrasi Negara - S-1 Administrasi Publik - S-1 Ilmu Pemerintahan - S-1 Manajemen - S-1 Manajemen Sumber Daya Manusia - S-1 Sistem Informasi	37	-	-	-	**37**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kebutuhan				Jumlah Formasi
			Umum	Disabilitas	Putra/Putri Papua	*cum laude*	
6	Auditor Ahli Pertama	- S-1 Administrasi Negara - S-1 Administrasi Publik - S-1 Akuntansi - S-1 Hukum - S-1 Ilmu Ekonomi - S-1 Manajemen - D-IV Akuntansi - D-IV Manajemen	66	-	-	6	**72**
7	Manggala Informatika Ahli Pertama	- S-1 Ilmu Komputer - S-1 Informatika - S-1 Sistem Informasi - S-1 Teknik Informatika - S-1 Teknologi Informasi	3	-	-	-	**3**
8	Penelaah Teknis Kebijakan	- S-1 Administrasi Bisnis - S-1 Administrasi Negara - S-1 Administrasi Publik - S-1 Akuntansi - S-1 Arsitektur - S-1 Desain Komunikasi Visual - S-1 Ekonomi - S-1 Ekonomi dan Studi Pembangunan - S-1 Ekonomi Pembangunan - S-1 Gizi - S-1 Hubungan Masyarakat - S-1 Hukum - S-1 Ilmu Ekonomi - S-1 Ilmu Hukum - S-1 Ilmu Komputer - S-1 Ilmu Komunikasi - S-1 Ilmu Pemerintahan - S-1 Ilmu Perpustakaan - S-1 Informatika	1.290	33	6	-	**1.329**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kebutuhan				Jumlah Formasi
			Umum	Disabilitas	Putra/Putri Papua	*cum laude*	
		- S-1 Kesehatan Masyarakat - S-1 Kesejahteraan Sosial - S-1 Manajemen - S-1 Manajemen dan Kebijakan Publik - S-1 Manajemen Logistik - S-1 Manajemen Sumber Daya Manusia - S-1 Matematika - S-1 Pemberdayaan Masyarakat - S-1 Psikologi - S-1 Sistem Informasi - S-1 Sosiologi - S-1 Statistika - S-1 Teknik Industri - S-1 Teknik Informatika - S-1 Teknik Sipil - S-1 Teknologi Informasi - S-1 Teknologi Pangan - D-IV Akuntansi - D-IV Analis Keuangan - D-IV Gizi dan Dietetika - D-IV Manajemen Aset - D-IV Manajemen Rekod dan Arsip - D-IV Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi - D-IV Sistem Informasi - D-IV Teknik Informatika					
9	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	- S-1 Administrasi Publik - S-1 Akuntansi - S-1 Arsitektur - S-1 Hukum - S-1 Manajemen - S-1 Teknik Industri - S-1 Teknik Mesin - S-1 Teknik Sipil	5	-	-	-	**5**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kebutuhan				Jumlah Formasi
			Umum	Disabilitas	Putra/Putri Papua	*cum laude*	
10	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	- S-1 Hukum - S-1 Hukum Administrasi Negara - S-1 Hukum Tata Negara - S-1 Ilmu Hukum	10	-	-	-	**10**
11	Perencana Ahli Pertama	- S-1 Administrasi Negara - S-1 Administrasi Publik - S-1 Akuntansi - S-1 Ilmu Ekonomi - S-1 Manajemen - S-1 Perencanaan Pembangunan - S-1 Statistika	60	-	-	-	**60**
12	Pranata Komputer Ahli Pertama	- S-1 Ilmu Komputer - S-1 Informatika - S-1 Sistem Informasi - S-1 Teknik Komputer - S-1 Teknologi Informasi - D-IV Informatika - D-IV Teknik Komputer - D-IV Teknologi Informasi - D-IV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	26	-	-	-	**26**
13	Pustakawan Ahli Pertama	- S-1 Ilmu Perpustakaan - S-1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi - S-1 Perpustakaan dan Sains Informasi - D-IV Perpustakaan Digital	1	-	-	-	**1**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kebutuhan				Jumlah Formasi
			Umum	Disabilitas	Putra/Putri Papua	*cum laude*	
14	Sandiman Ahli Pertama	- S-1 Ilmu Komputer - S-1 Informatika - S-1 Rekayasa Keamanan Siber - S-1 Teknik Elektro - S-1 Teknik Komputer - S-1 Teknologi Informasi - D-IV Informatika - D-IV Keamanan Sistem Informasi - D-IV Teknik Komputer - D-IV Teknologi Informasi	1	-	-	-	**1**
15	Statistisi Ahli Pertama	- S-1 Matematika - S-1 Sains Data - S-1 Statistika	8	-	-	-	**8**
Jumlah			**1.563**	**33**	**6**	**16**	**1.618**

Rincian kualifikasi pendidikan dan alokasi untuk setiap unit penempatan tercantum dalam Lampiran pengumuman ini. Pelamar wajib memilih formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada unit penempatan yang dilamar.

B. KRITERIA PELAMAR BERDASARKAN JENIS KEBUTUHAN

1. Kebutuhan Umum

   Kebutuhan umum diperuntukkan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan dan tidak melamar pada kebutuhan khusus.

2. Kebutuhan Khusus

   Badan Gizi Nasional mengalokasikan kebutuhan khusus sebagai berikut:

   a. Penyandang Disabilitas, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) formasi, ditempatkan pada unit kerja setingkat eselon II di kantor pusat, diperuntukkan bagi pelamar penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit milik pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Putra/Putri Papua, sebanyak 6 (enam) formasi, ditempatkan pada KPPG Kelas I di wilayah Papua, diperuntukkan bagi pelamar putra/putri Papua yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan surat keterangan dari kepala desa/kepala suku.

c. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian" (*cum laude*), sebanyak 16 (enam belas) formasi (1% dari total alokasi), pada jabatan Auditor Ahli Pertama, Analis Kebijakan Ahli Pertama, dan Analis Hukum Ahli Pertama, diperuntukkan bagi pelamar lulusan sarjana/diploma empat dengan predikat kelulusan "dengan pujian" (*cum laude*) sesuai persyaratan pada angka II huruf D.

Badan Gizi Nasional tidak mengalokasikan kebutuhan khusus diaspora dan olahragawan berprestasi pada seleksi ini.

3. Penempatan kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian" (*cum laude*) sebagai berikut:

NO	JABATAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
1	Auditor Ahli Pertama	Inspektorat I – Inspektorat Utama	2
2	Auditor Ahli Pertama	Inspektorat II – Inspektorat Utama	2
3	Auditor Ahli Pertama	Inspektorat III – Inspektorat Utama	2
4	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Direktorat Sistem Pemenuhan Gizi – Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola	1
5	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Direktorat Tata Kelola Pemenuhan Gizi – Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola	1
6	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Direktorat Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi – Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola	1
7	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I – Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan	1
8	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah I – Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran	1
9	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi – Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama	1
10	Analis Hukum Ahli Pertama	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – Sekretariat Utama	4
JUMLAH			**16**

4. Penempatan kebutuhan khusus penyandang disabilitas pada unit kerja setingkat eselon II di kantor pusat sebagai berikut:

NO	JABATAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
1	Penelaah Teknis Kebijakan	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – Sekretariat Utama	2
2	Penelaah Teknis Kebijakan	Biro Manajemen Kinerja – Sekretariat Utama	2
3	Penelaah Teknis Kebijakan	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang dan Jasa – Sekretariat Utama	2
4	Penelaah Teknis Kebijakan	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi – Sekretariat Utama	2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Biro Umum dan Keuangan – Sekretariat Utama	3
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama – Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama	1
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi – Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama	1
8	Penelaah Teknis Kebijakan	Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat – Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama	1
9	Penelaah Teknis Kebijakan	Direktorat Kerja Sama dan Kemitraan – Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama	1
10	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran – Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran	1
11	Penelaah Teknis Kebijakan	Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah I – Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran	1
12	Penelaah Teknis Kebijakan	Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II – Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran	1
13	Penelaah Teknis Kebijakan	Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III – Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran	1
14	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola – Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola	1
15	Penelaah Teknis Kebijakan	Direktorat Sistem Pemenuhan Gizi – Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola	1
16	Penelaah Teknis Kebijakan	Direktorat Tata Kelola Pemenuhan Gizi – Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola	1
17	Penelaah Teknis Kebijakan	Direktorat Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi – Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola	1
18	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan – Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan	1
19	Penelaah Teknis Kebijakan	Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I – Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan	1
20	Penelaah Teknis Kebijakan	Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II – Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan	1
21	Penelaah Teknis Kebijakan	Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III – Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan	1
22	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Inspektorat Utama – Inspektorat Utama	1
23	Penelaah Teknis Kebijakan	Inspektorat I – Inspektorat Utama	1
24	Penelaah Teknis Kebijakan	Inspektorat II – Inspektorat Utama	1
25	Penelaah Teknis Kebijakan	Inspektorat III – Inspektorat Utama	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
26	Penelaah Teknis Kebijakan	Pusat Data dan Sistem Informasi	2
JUMLAH			33

II. PERSYARATAN PELAMAR

A. PERSYARATAN UMUM

Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun 0 bulan 0 hari pada saat menyelesaikan pendaftaran daring (online) di laman https://sscasn.bkn.go.id, berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah yang digunakan sebagai dasar pelamaran;

c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan CPNS);

d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

e. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri;

f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

g. memiliki ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) dengan kualifikasi pendidikan/program studi sesuai dengan persyaratan jabatan dan formasi yang dilamar, yang wajib telah dimiliki pada saat mendaftar (Surat Keterangan Lulus/ijazah sementara tidak berlaku), dengan ketentuan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1) pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B/Baik Sekali pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
2) pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki dokumen yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yang membuktikan kesetaraan kualifikasi pendidikan dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan pada jabatan yang dilamar;

h. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) pada skala 4,00 (empat koma nol nol), kecuali bagi pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan putra/putri Papua sebagaimana diatur pada huruf B dan huruf C;
i. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
j. tidak berstatus sebagai pelamar yang sedang mengikuti seleksi Pengadaan Pegawai ASN lainnya;
k. tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon PNS yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
l. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
m. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah, termasuk pada seluruh satuan kerja/unit di lingkungan Badan Gizi Nasional;
n. memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jabatan yang dilamar, dan seluruh dokumen yang diunggah serta data yang diberikan adalah benar dan bukan palsu;
o. tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah; dan
p. bersedia mengabdi di Badan Gizi Nasional, ditempatkan pada unit penempatan sesuai dengan formasi yang dilamar, dan tidak akan mengajukan pindah antarsatuan kerja di lingkungan Badan Gizi Nasional maupun pindah instansi dengan alasan pribadi paling singkat selama 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai CPNS.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. PERSYARATAN BAGI PELAMAR KEBUTUHAN KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS

Selain memenuhi persyaratan pada huruf A (kecuali ketentuan IPK), pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas wajib:

1. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit milik pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, yang diunggah pada https://sscasn.bkn.go.id;
2. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar;
3. mampu mengoperasikan sarana kerja dan komputer sesuai dengan tugas jabatan yang dilamar; dan
4. memiliki IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) pada skala 4,00 (empat koma nol nol).

C. PERSYARATAN BAGI PELAMAR KEBUTUHAN KHUSUS PUTRA/PUTRI PAPUA

Selain memenuhi persyaratan pada huruf A (kecuali ketentuan IPK), pelamar kebutuhan khusus putra/putri Papua wajib:

1. melampirkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang bersangkutan;
2. melampirkan surat keterangan dari kepala desa/kepala suku; dan
3. memiliki IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) pada skala 4,00 (empat koma nol nol).

D. PERSYARATAN BAGI PELAMAR KEBUTUHAN KHUSUS *CUM LAUDE*

Selain memenuhi persyaratan pada huruf A, pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian" (*cum laude*) wajib:

1. mempunyai jenjang pendidikan paling rendah sarjana/diploma empat;
2. bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri, memiliki predikat kelulusan "dengan pujian" (*cum laude*) dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul dan program studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
3. bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, melampirkan dokumen yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, berupa dokumen penyetaraan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan kesetaraan kualifikasi pendidikan, dan dokumen yang menyatakan bahwa predikat kelulusan yang diperoleh setara dengan predikat "dengan pujian" (*cum laude*).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

III. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran seleksi CPNS Badan Gizi Nasional Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara daring melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dengan tahapan sebagai berikut:

A. PEMBUATAN AKUN

1. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum pada KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, pelamar agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;
2. Mengisi data identitas sesuai KTP dan ijazah serta kolom isian lainnya;
3. Melakukan swafoto dan verifikasi wajah yang divalidasi dengan data kependudukan (Dukcapil) sesuai petunjuk pada SSCASN, dengan wajah terlihat jelas (saat melakukan swafoto, pelamar diwajibkan menggunakan pakaian formal dan sopan serta didukung dengan pencahayaan yang cukup);
4. Mengaktifkan autentikasi multifaktor (MFA) menggunakan aplikasi authenticator dan kode OTP sesuai petunjuk pada SSCASN;
5. Memastikan seluruh data yang dimasukkan sudah lengkap dan benar (data yang sudah disimpan tidak dapat diperbaiki); dan
6. Mencetak Kartu Informasi Akun.

B. PELAMARAN

1. Pelamar masuk (*login*) ke akun pada laman https://sscasn.bkn.go.id menggunakan NIK dan kata sandi yang telah didaftarkan;
2. Pelamar melengkapi data diri. Pelamar penyandang disabilitas wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan tautan video singkat sebagaimana dimaksud pada angka II huruf B;
3. Pelamar memilih jenis seleksi CPNS, instansi Badan Gizi Nasional, jenis kebutuhan, kualifikasi pendidikan, jabatan, dan unit penempatan yang akan dilamar. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis formasi jabatan;
4. Pelamar mengisi riwayat pekerjaan (pengalaman kerja), apabila ada;
5. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas:
   a) surat pernyataan pelamar (Surat Pernyataan Diri) yang dihasilkan oleh SSCASN (telah memuat surat lamaran), wajib ditandatangani menggunakan pena bertinta hitam, dibubuhi meterai elektronik (e-meterai) atau meterai tempel senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan diunggah melalui kolom unggahan yang tersedia pada portal SSCASN;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b) surat pernyataan kesediaan penempatan yang diketik menggunakan komputer dan ditandatangani oleh pelamar dengan dibubuhi meterai elektronik (e-meterai) atau meterai tempel (konvensional) senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) (format terlampir pada laman resmi Badan Gizi Nasional);

c) transkrip nilai asli (bukan draf/konsep/sementara/legalisir) yang menampilkan seluruh halaman sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;

d) KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, apabila diperlukan untuk verifikasi alternatif;

e) bukti akreditasi perguruan tinggi dan program studi dari BAN-PT/LAM pada saat kelulusan, apabila tidak dapat diverifikasi secara otomatis oleh SSCASN;

f) dokumen penyetaraan ijazah dan konversi IPK bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri; dan

g) dokumen kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada angka II huruf B, huruf C, atau huruf D bagi pelamar kebutuhan khusus.

6. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan dalam bentuk PDF sesuai dengan jenis formasi yang dilamar, dengan ketentuan dokumen merupakan hasil pindai (scan) berkas asli berwarna (tidak hitam putih), bukan fotokopi, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, dapat dibuka (file tidak rusak), terbaca, dan jelas;
7. Dokumen kelengkapan yang diberikan saat proses pengisian pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) antara lain Ijazah, pasfoto, surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan rohani dan surat keterangan bebas NAPZA, serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) wajib diunggah pada laman SSCASN;
8. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dapat terbaca. Kesalahan dalam mengisi data atau mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi; dan
9. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mengunduh Kartu Pendaftaran yang diterbitkan SSCASN sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran. Setelah pendaftaran diakhiri, pelamar tidak dapat mengubah data.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IV. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi CPNS Badan Gizi Nasional Tahun Anggaran 2026 terdiri atas Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

A. SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi administrasi dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian data dan dokumen yang diunggah dengan persyaratan, termasuk kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan formasi pada unit penempatan yang dilamar sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
2. Seleksi administrasi bersifat menggugurkan, Pelamar yang tidak mengunggah salah satu dokumen dari persyaratan yang disyaratkan dapat mengakibatkan pelamar gugur/Tidak Memenuhi Syarat(TMS) dan dokumen administrasi pendaftaran pelamar yang sesuai dengan persyaratan seleksi dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Pelamar yang dinyatakan TMS tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
3. Aspek yang diperiksa meliputi:
   a. kelengkapan dokumen persyaratan administrasi;
   b. kesesuaian kualifikasi pelamar dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
   c. kesesuaian format, isi, dan keabsahan dokumen administrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
4. Pada masa sanggah dimungkinkan terjadi perubahan status dari yang sebelumnya lulus menjadi tidak lulus seleksi administrasi karena ditemukan adanya persyaratan yang tidak sesuai ketentuan atau kecurangan.

B. SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

1. SKD dilaksanakan dengan sistem CAT BKN dan meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP), dengan durasi waktu sebagai berikut:
   a. 100 (seratus) menit; atau
   b. 130 (seratus tiga puluh) menit bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
2. Jumlah soal SKD adalah 110 (seratus sepuluh) butir soal, terdiri atas TWK 30 (tiga puluh) butir soal, TIU 35 (tiga puluh lima) butir soal, dan TKP 45 (empat puluh lima) butir soal.
3. Pembobotan nilai SKD sebagai berikut:
   a. untuk TWK dan TIU, jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
   b. untuk TKP, jawaban bernilai paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Nilai kumulatif paling tinggi SKD adalah 550 (lima ratus lima puluh), terdiri atas TWK 150 (seratus lima puluh), TIU 175 (seratus tujuh puluh lima), dan TKP 225 (dua ratus dua puluh lima).
5. Nilai Ambang Batas SKD sebagai berikut:

NO	JENIS KEBUTUHAN	NILAI AMBANG BATAS
1	Kebutuhan Umum	TWK 65; TIU 80; dan TKP 166
2	Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas	Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 dan nilai TIU paling rendah 60
3	Kebutuhan Khusus Putra/Putri Papua	Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 dan nilai TIU paling rendah 60
4	Kebutuhan Khusus *cum laude*	Nilai kumulatif SKD paling rendah 311 dan nilai TIU paling rendah 85

6. Penggunaan nilai SKD tahun anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pelamar dapat menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan PNS tahun anggaran 2024 dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      1) melamar di SSCASN menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2024;
      2) melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2024;
      3) melamar pada jabatan dan/atau instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2026;
      4) memenuhi Nilai Ambang Batas SKD tahun anggaran 2026 sesuai dengan jenis kebutuhan yang dilamar; dan
      5) dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2026;
   b. pelamar yang memilih menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2024 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2026;
   c. dalam hal pelamar memilih mengikuti SKD tahun anggaran 2026, nilai yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2026;
   d. Panitia Seleksi mengumumkan pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2024 dan pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2026 dalam pengumuman hasil seleksi administrasi; dan
   e. pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2026 dapat menggunakan nilai SKD tersebut hanya pada pengadaan PNS berikutnya, dan apabila pelamar memilih mengikuti SKD kembali pada pengadaan tersebut, nilai SKD tahun anggaran 2026 dinyatakan tidak berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2024 dan pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2026 dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi Nilai Ambang Batas SKD pada jenis kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik.

C. SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

1. SKB dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
2. Materi SKB untuk Jabatan Fungsional disusun oleh instansi pembina Jabatan Fungsional dan untuk Jabatan Pelaksana disusun oleh instansi teknis Jabatan Pelaksana atau dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan Jabatan Fungsional terkait.
3. SKB dilaksanakan dengan sistem CAT BKN dengan durasi waktu sebagai berikut:
   a. 90 (sembilan puluh) menit; atau
   b. 120 (seratus dua puluh) menit bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
4. Jumlah soal SKB sebagai berikut:
   a. 80 (delapan puluh) butir soal untuk jabatan dengan materi SKB dominan memuat operasi perhitungan; atau
   b. 100 (seratus) butir soal untuk jabatan dengan materi SKB tidak dominan memuat operasi perhitungan.
5. Pembobotan nilai SKB yaitu jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).
6. Nilai akhir SKB setelah penambahan nilai paling tinggi sebesar nilai maksimal SKB yang telah ditetapkan.

V. JADWAL SELEKSI

Jadwal seleksi CPNS Badan Gizi Nasional Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7758/B-KS.04.01/SD/K/2026 tanggal 24 November 2026, sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	25 November s.d. 09 Desember 2026
2	Pendaftaran Seleksi	27 November s.d. 21 Desember 2026
3	Seleksi Administrasi	27 November 2026 s.d. 04 Januari 2027
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	05 s.d. 08 Januari 2027
5	Masa Sanggah	09 s.d. 11 Januari 2027
6	Jawab Sanggah	09 s.d. 13 Januari 2027
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	14 s.d. 16 Januari 2027
8	Pemetaan Lokasi SKD CPNS	17 s.d. 22 Januari 2027

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KEGIATAN	JADWAL
9	Penjadwalan SKD CPNS	23 s.d. 26 Januari 2027
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi SKD CPNS	27 Januari s.d. 01 Februari 2027
11	Pelaksanaan SKD CPNS	02 s.d. 21 Februari 2027
12	Pengolahan Nilai SKD CPNS	17 s.d. 28 Februari 2027
13	Pengumuman Hasil SKD CPNS	01 s.d. 07 Maret 2027
14	Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT	16 s.d. 17 Maret 2027
15	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta	18 s.d. 20 Maret 2027
16	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	21 s.d. 23 Maret 2027
17	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	24 s.d. 29 Maret 2027
18	Pelaksanaan SKB CPNS	30 Maret s.d. 06 April 2027
19	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	03 s.d. 12 April 2027
20	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	13 s.d. 17 April 2027
21	Pengumuman Hasil CPNS	15 s.d. 20 April 2027
22	Masa Sanggah	21 s.d. 23 April 2027
23	Jawab Sanggah	21 s.d. 24 April 2027
24	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	25 s.d. 28 April 2027
25	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	29 April s.d. 02 Mei 2027
26	Pengisian DRH NIP CPNS	03 s.d. 17 Mei 2027
27	Usul Penetapan NIP CPNS	08 s.d. 22 Mei 2027

Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan Panitia Seleksi Nasional. Lokasi SKD dan SKB dengan CAT BKN ditentukan berdasarkan pemetaan dan pilihan titik lokasi oleh peserta pada SSCASN. Pelamar agar memantau informasi secara berkala pada laman https://sscasn.bkn.go.id, atau laman resmi Badan Gizi Nasional https://www.bgn.go.id.

VI. PENGOLAHAN HASIL AKHIR DAN KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi data dan dokumen, dan diumumkan oleh Panitia Seleksi Badan Gizi Nasional. Pelamar yang lulus wajib mencetak kartu peserta ujian melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.
2. Kelulusan SKD ditentukan berdasarkan Nilai Ambang Batas SKD sebagaimana tercantum pada angka IV huruf B angka 5.
3. Pengolahan hasil akhir dilakukan berdasarkan integrasi nilai SKD dan SKB sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan peringkat pada masing-masing jenis kebutuhan, jabatan, dan unit penempatan.
4. Kebutuhan yang belum terpenuhi setelah pengolahan hasil akhir diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. kebutuhan umum yang belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar kebutuhan khusus dengan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan yang sama, yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik;
b. kebutuhan khusus yang belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar kebutuhan khusus yang sama dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan yang berbeda, yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik;
c. dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, dapat diisi dari pelamar kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya secara berurutan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri PANRB Nomor 674 Tahun 2026; dan
d. kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan putra/putri Papua hanya dapat diisi oleh pelamar yang melamar pada jenis kebutuhan khusus yang sama.

5. Hasil akhir seleksi diumumkan oleh Panitia Seleksi Badan Gizi Nasional setelah mendapat persetujuan Panitia Seleksi Nasional.

VII. LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
2. Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mengikuti tahapan seleksi pada waktu dan tempat yang ditetapkan dinyatakan gugur.
3. Pelamar yang memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar, kelulusannya dan/atau pengangkatannya dibatalkan dan dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan telah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Apabila terdapat peserta yang lulus tahap akhir mengundurkan diri sebelum ditetapkan NIP, Panitia Seleksi dapat mengusulkan pengganti dari peserta dengan peringkat berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, baik dari pegawai Badan Gizi Nasional maupun dari pihak lain, hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Peserta maupun pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apa pun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Transportasi dan akomodasi pelamar selama pelaksanaan seleksi ditanggung oleh pelamar.
8. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab pelamar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Setiap informasi dan perubahan terkait seleksi CPNS Badan Gizi Nasional Tahun Anggaran 2026 diumumkan secara resmi melalui laman resmi Badan Gizi Nasional dan https://sscasn.bkn.go.id.
10. Pelamar dapat mengajukan sanggahan pada tahapan seleksi yang menyediakan masa sanggah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanggahan hanya dapat diterima apabila ketidaksesuaian hasil seleksi disebabkan oleh kesalahan yang bukan berasal dari pelamar.
11. Masa sanggah tidak dapat digunakan untuk memperbaiki, mengganti, atau melengkapi dokumen persyaratan yang telah diunggah. Dalam hal terdapat sanggahan yang diterima, Panitia Seleksi Badan Gizi Nasional dapat melakukan penyesuaian hasil seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara **tidak diperkenankan** menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
13. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat setelah masa sanggah berakhir.
14. Layanan informasi dan pengaduan dapat disampaikan melalui helpdesk +62 888-0894-6045 dan surel cpns@bgn.go.id.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Jakarta, 27 November 2026
Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional
selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan
Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Badan Gizi Nasional Tahun Anggaran 2026,

Dr. Lili Khamiliyah, S.E., M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN PENGUMUMAN
NOMOR: 001/PANSELNAS.BGN/XI/2026
TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI
PENGADAAN CPNS BADAN GIZI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN FORMASI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN UNIT PENEMPATAN

(Keputusan Menteri PANRB Nomor 651 Tahun 2026)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
1	Analis Hukum Ahli Pertama	S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM TATA NEGARA | S-1 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	Sekretariat Utama – Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	7
2	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 HUKUM | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK	Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama – Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
3	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 KEBIJAKAN PUBLIK | S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 STATISTIKA | S-1 SAINS DATA | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 MANAJEMEN LOGISTIK	Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran – Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III	4
4	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 TEKNOLOGI PANGAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 STATISTIKA | S-1 PERENCANAAN WILAYAH | S-1 SAINS DATA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola – Direktorat Sistem Pemenuhan Gizi	4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
5	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 MANAJEMEN | S-1 HUKUM | S-1 STATISTIKA | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN | S-1 TEKNIK LINGKUNGAN | S-1 TEKNIK GEOFISIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 ILMU EKONOMI	Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola – Direktorat Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi	4
6	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 STATISTIKA | S-1 AKUNTANSI | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan – Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III	4
7	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 KEBIJAKAN PUBLIK | S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 STATISTIKA | S-1 SAINS DATA | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 MANAJEMEN LOGISTIK	Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran – Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah I	4
8	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 MANAJEMEN | S-1 HUKUM | S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 ILMU OLAHRAGA	Sekretariat Utama – Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	3
9	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 STATISTIKA | S-1 AKUNTANSI | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan – Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I	4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
10	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 ILMU PERTANIAN | S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S-1 MANAJEMEN LOGISTIK | S-1 ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN	Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola – Direktorat Tata Kelola Pemenuhan Gizi	4
11	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 STATISTIKA | S-1 AKUNTANSI | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan – Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II	4
12	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 MANAJEMEN | S-1 HUKUM | S-1 STATISTIKA | S-1 SAINS DATA | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 ILMU POLITIK | S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S-1 ILMU EKONOMI	Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama – Direktorat Kerja Sama dan Kemitraan	3
13	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 KEBIJAKAN PUBLIK | S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 STATISTIKA | S-1 SAINS DATA | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 MANAJEMEN LOGISTIK	Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran – Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II	4
14	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN | S-1 MANAJEMEN | S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama – Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi	4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
15	Analis Kerja Sama Ahli Pertama	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 MANAJEMEN | S-1 HUKUM | S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT | S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | S-1 ILMU KOMUNIKASI	Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama – Direktorat Kerja Sama dan Kemitraan	1
16	Analis Kerja Sama Ahli Pertama	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	Sekretariat Utama – Biro Manajemen Kinerja	1
17	Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama	S-1 PSIKOLOGI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | S-1 ADMINISTRASI NEGARA	Sekretariat Utama – Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	7
18	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S-1 MANAJEMEN | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola – Sekretariat Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola	3
19	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S-1 MANAJEMEN | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	Sekretariat Utama – Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	19
20	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S-1 MANAJEMEN | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	Pusat Data dan Sistem Informasi – Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Sistem Informasi	3
21	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S-1 MANAJEMEN | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	Inspektorat Utama – Sekretariat Inspektorat Utama	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
22	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S-1 MANAJEMEN | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan – Sekretariat Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan	3
23	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S-1 MANAJEMEN | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama – Sekretariat Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama	3
24	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S-1 MANAJEMEN | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran – Sekretariat Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran	3
25	Auditor Ahli Pertama	S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | D-IV MANAJEMEN | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 HUKUM | S-1 ILMU EKONOMI	Inspektorat Utama – Inspektorat I	24
26	Auditor Ahli Pertama	S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | D-IV MANAJEMEN | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 HUKUM	Inspektorat Utama – Inspektorat III	24
27	Auditor Ahli Pertama	S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | D-IV MANAJEMEN | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 HUKUM | S-1 ILMU EKONOMI	Inspektorat Utama – Inspektorat II	24
28	Manggala Informatika Ahli Pertama	S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	Pusat Data dan Sistem Informasi	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
29	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Pegunungan Arfak – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Pegunungan Arfak	3
30	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Muara Enim – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Muara Enim	3
31	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Muna – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Muna	3
32	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bungo – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bungo	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
33	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 MANAJEMEN | S-1 HUKUM | S-1 STATISTIKA | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan – Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III	5
34	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 HUKUM | S-1 STATISTIKA | S-1 SISTEM INFORMASI	Inspektorat Utama – Inspektorat I	5
35	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Aceh – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3
36	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Garut 2 – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Garut 2	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
37	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Nusa Tenggara Barat – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1
38	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kabupaten Tasikmalaya – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kabupaten Tasikmalaya	3
39	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kepulauan Selayar – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kepulauan Selayar	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
40	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Bali – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1
41	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 MANAJEMEN | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN | S-1 MANAJEMEN LOGISTIK | S-1 INFORMATIKA	Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola – Direktorat Tata Kelola Pemenuhan Gizi	5
42	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Batang – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Batang	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
43	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Sulawesi Tengah – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1
44	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kota Probolinggo – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kota Probolinggo	3
45	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Maluku Utara – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
46	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Brebes – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Brebes	3
47	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 HUKUM | S-1 STATISTIKA | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama – Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi	5
48	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Sumatera Selatan – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
49	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Papua Barat Daya – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3
50	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Sleman – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Sleman	3
51	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Kalimantan Utara – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
52	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Kalimantan Barat – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1
53	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Banten – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3
54	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kabupaten Tangerang – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kabupaten Tangerang	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
55	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bengkayang – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bengkayang	3
56	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Wonosobo – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Wonosobo	3
57	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kolaka – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kolaka	3
58	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 STATISTIKA | S-1 AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola – Sekretariat Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola	5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
59	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 MANAJEMEN LOGISTIK | S-1 STATISTIKA | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran – Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II	5
60	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Jombang – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Jombang	3
61	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Maluku – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1
62	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 STATISTIKA	Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama – Direktorat Kerja Sama dan Kemitraan	5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
63	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Papua Selatan – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1
64	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Nusa Tenggara Timur – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3
65	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT | S-1 MANAJEMEN LOGISTIK | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	Sekretariat Utama – Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	10

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
66	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Parepare – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Parepare	3
67	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kepulauan Aru – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kepulauan Aru	3
68	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bireuen – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bireuen	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
69	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Daerah Khusus Jakarta – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3
70	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Puncak – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Puncak	3
71	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Balangan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Balangan	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
72	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kota Depok – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kota Depok	3
73	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Cianjur 2 – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Cianjur 2	3
74	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I D.I. Yogyakarta – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
75	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Tulungagung – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Tulungagung	3
76	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Lampung – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
77	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Jawa Barat – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3
78	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Pacitan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Pacitan	3
79	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Aceh – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
80	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kota Tangerang – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kota Tangerang	3
81	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Sukoharjo – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Sukoharjo	3
82	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Mappi – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Mappi	3
83	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Banjarnegara – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Banjarnegara	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
84	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Sulawesi Barat – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1
85	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Jakarta Barat – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Jakarta Barat	3
86	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Jawa Timur – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
87	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Cilegon – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Cilegon	3
88	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Gorontalo – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1
89	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Halmahera Tengah – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Halmahera Tengah	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
90	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bogor 1 – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bogor 1	3
91	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Papua Pegunungan – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3
92	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN | S-1 HUKUM	Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama – Sekretariat Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama	5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
93	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Lampung Timur – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Lampung Timur	3
94	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Teluk Bintuni – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Teluk Bintuni	3
95	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bekasi 2 – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bekasi 2	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
96	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Jambi – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3
97	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Papua Barat – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
98	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Sulawesi Tengah – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3
99	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Bangka Belitung – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1
100	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Bangka Belitung – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
101	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Buru – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Buru	3
102	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Maluku Utara – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3
103	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Subulussalam – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Subulussalam	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
104	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Supiori – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Supiori	3
105	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Flores Timur – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Flores Timur	3
106	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Solok – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Solok	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
107	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Bangka Belitung – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3
108	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Binjai – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Binjai	3
109	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 SISTEM INFORMASI | D-IV SISTEM INFORMASI | S-1 STATISTIKA	Sekretariat Utama – Biro Manajemen Kinerja	10

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
110	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Papua – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1
111	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Sulawesi Selatan – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1
112	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Sragen – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Sragen	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
113	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Jawa Tengah – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1
114	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Indragiri Hilir – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Indragiri Hilir	3
115	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Tambrauw – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Tambrauw	3
116	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 MANAJEMEN | S-1 HUKUM | S-1 STATISTIKA | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan – Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II	5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
117	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Yalimo – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Yalimo	3
118	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Luwu Timur – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Luwu Timur	3
119	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | S-1 MANAJEMEN | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 PSIKOLOGI | S-1 ILMU PEMERINTAHAN	Sekretariat Utama – Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	10
120	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Dogiyai – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Dogiyai	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
121	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Papua Pegunungan – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1
122	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Mamberamo Tengah – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Mamberamo Tengah	3
123	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Siak – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Siak	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
124	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Sumatera Selatan – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3
125	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Trenggalek – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Trenggalek	3
126	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kotawaringin Barat – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kotawaringin Barat	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
127	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Ketapang – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Ketapang	3
128	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Sumatera Utara – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1
129	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Kalimantan Utara – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
130	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Ogan Komering Ilir – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Ogan Komering Ilir	3
131	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Sukabumi 2 – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Sukabumi 2	3
132	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 STATISTIKA | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan – Sekretariat Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan	5
133	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 MANAJEMEN LOGISTIK | S-1 STATISTIKA | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran – Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah I	5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
134	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Tanah Bumbu – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Tanah Bumbu	3
135	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Sulawesi Barat – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3
136	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Sukabumi 3 – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Sukabumi 3	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
137	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bogor 2 – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bogor 2	3
138	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kabupaten Sorong – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kabupaten Sorong	3
139	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Padang Lawas – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Padang Lawas	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
140	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Jawa Barat – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1
141	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Sumatera Selatan – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1
142	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kuningan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kuningan	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
143	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kebumen – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kebumen	3
144	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Jawa Tengah – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1
145	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 STATISTIKA | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN | S-1 HUKUM	Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran – Sekretariat Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran	5
146	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Daerah Khusus Jakarta – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
147	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Baubau – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Baubau	3
148	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Intan Jaya – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Intan Jaya	3
149	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Sumatera Barat – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
150	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Toba – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Toba	3
151	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Balikpapan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Balikpapan	3
152	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Jawa Timur – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
153	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kaimana – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kaimana	3
154	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bengkulu Selatan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bengkulu Selatan	3
155	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Karanganyar – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Karanganyar	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
156	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Sulawesi Tenggara – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3
157	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Tual – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Tual	3
158	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Batam – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Batam	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
159	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Situbondo – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Situbondo	3
160	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Belu – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Belu	3
161	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 HUKUM | S-1 STATISTIKA	Pusat Data dan Sistem Informasi – Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Sistem Informasi	10
162	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Takalar – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Takalar	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
163	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Lombok Tengah – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Lombok Tengah	3
164	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kampar – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kampar	3
165	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Jakarta Timur – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Jakarta Timur	3
166	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Klaten – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Klaten	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
167	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Deli Serdang – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Deli Serdang	3
168	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kota Magelang – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kota Magelang	3
169	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Manokwari Selatan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Manokwari Selatan	3
170	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Tapanuli Utara – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Tapanuli Utara	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
171	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Seram Bagian Timur – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Seram Bagian Timur	3
172	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Parigi Moutong – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Parigi Moutong	3
173	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Ngada – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Ngada	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
174	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Banten – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1
175	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kepulauan Sangihe – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kepulauan Sangihe	3
176	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Kalimantan Tengah – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
177	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Pati – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Pati	3
178	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Kalimantan Selatan – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1
179	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Kalimantan Utara – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
180	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Tanjung Jabung Barat – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Tanjung Jabung Barat	3
181	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Papua Pegunungan – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1
182	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Bengkulu – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
183	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Sulawesi Utara – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1
184	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Padang Sidempuan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Padang Sidempuan	3
185	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Gianyar – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Gianyar	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
186	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Indramayu – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Indramayu	3
187	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Seram Bagian Barat – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Seram Bagian Barat	3
188	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Kepulauan Riau – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
189	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Keerom – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Keerom	3
190	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Sumatera Utara – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3
191	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Sungai Penuh – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Sungai Penuh	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
192	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Bali – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3
193	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bontang – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bontang	3
194	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kutai Kartanegara – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kutai Kartanegara	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
195	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Purworejo – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Purworejo	3
196	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Sulawesi Utara – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1
197	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Gorontalo – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Gorontalo	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
198	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Nusa Tenggara Timur – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1
199	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Daerah Khusus Jakarta – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1
200	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Papua Tengah – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
201	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Subang – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Subang	3
202	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Pegunungan Bintang – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Pegunungan Bintang	3
203	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Sidoarjo – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Sidoarjo	3
204	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Pringsewu – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Pringsewu	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
205	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Papua Barat Daya – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1
206	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Nusa Tenggara Timur – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1
207	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Riau – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
208	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Singkawang – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Singkawang	3
209	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Mamberamo Raya – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Mamberamo Raya	3
210	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Gorontalo – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
211	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Pariaman – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Pariaman	3
212	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Pasaman Barat – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Pasaman Barat	3
213	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Maluku – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
214	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Blora – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Blora	3
215	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Jawa Tengah – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3
216	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Banggai Laut – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Banggai Laut	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
217	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Kalimantan Tengah – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3
218	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Papua Selatan – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
219	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kudus – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kudus	3
220	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bondowoso – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bondowoso	3
221	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Jambi – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
222	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Riau – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3
223	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Nusa Tenggara Barat – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
224	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Riau – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1
225	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Lampung – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1
226	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Lingga – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Lingga	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
227	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Ponorogo – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Ponorogo	3
228	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Papua – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1
229	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 HUKUM	Sekretariat Utama – Biro Umum dan Keuangan – Bagian Rumah Tangga Tata Usaha dan Protokol – Subbagian Tata Usaha Kepala dan Wakil Kepala	5
230	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Lubuk Linggau – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Lubuk Linggau	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
231	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bitung – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bitung	3
232	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kepulauan Mentawai – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kepulauan Mentawai	3
233	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Lampung Barat – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Lampung Barat	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
234	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Sumatera Utara – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1
235	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Kalimantan Timur – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1
236	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kepulauan Sula – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kepulauan Sula	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
237	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bogor 5 – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bogor 5	3
238	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Sintang – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Sintang	3
239	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Aceh – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
240	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Jepara – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Jepara	3
241	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Landak – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Landak	3
242	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Kalimantan Barat – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
243	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Kalimantan Timur – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1
244	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Nusa Tenggara Barat – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1
245	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Sulawesi Selatan – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
246	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Jambi – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1
247	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SOSIOLOGI | S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL | S-1 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama – Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	5
248	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Kalimantan Barat – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
249	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bogor 3 – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bogor 3	3
250	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Ende – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Ende	3
251	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Banyumas – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Banyumas	3
252	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Mamasa – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Mamasa	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
253	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Jawa Timur – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1
254	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kota Pasuruan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kota Pasuruan	3
255	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Sulawesi Selatan – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
256	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I D.I. Yogyakarta – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3
257	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Bengkulu – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1
258	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Dharmasraya – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Dharmasraya	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
259	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Jawa Barat – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1
260	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Sulawesi Barat – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pemenuhan Gizi	1
261	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kota Madiun – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kota Madiun	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
262	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Sulawesi Tenggara – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1
263	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bangkalan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bangkalan	3
264	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Kalimantan Tengah – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
265	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Bengkulu – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3
266	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Sulawesi Tenggara – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1
267	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Pematang Siantar – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Pematang Siantar	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
268	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Sulawesi Tengah – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1
269	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Papua Barat Daya – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1
270	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Berau – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Berau	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
271	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Metro – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Metro	3
272	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Banten – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1
273	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Fakfak – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Fakfak	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
274	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Kepulauan Riau – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1
275	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Sumatera Barat – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1
276	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Tuban – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Tuban	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
277	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kota Blitar – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kota Blitar	3
278	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Teluk Wondama – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Teluk Wondama	3
279	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Papua Tengah – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
280	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kapuas Hulu – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kapuas Hulu	3
281	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Yahukimo – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Yahukimo	3
282	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Minahasa – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Minahasa	3
283	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Tanah Laut – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Tanah Laut	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
284	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kota Mojokerto – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kota Mojokerto	3
285	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Maluku Utara – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1
286	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Pohuwato – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Pohuwato	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
287	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kotamobagu – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kotamobagu	3
288	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Jakarta Utara – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Jakarta Utara	3
289	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Kalimantan Selatan – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
290	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Temanggung – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Temanggung	3
291	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Jember – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Jember	3
292	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Biak Numfor – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Biak Numfor	3
293	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bima – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bima	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
294	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Muaro Jambi – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Muaro Jambi	3
295	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 HUKUM	Sekretariat Utama – Biro Umum dan Keuangan – Bagian Rumah Tangga Tata Usaha dan Protokol – Subbagian Protokol	5
296	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Konawe Selatan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Konawe Selatan	3
297	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Banggai – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Banggai	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
298	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bulukumba – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bulukumba	3
299	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Majalengka – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Majalengka	3
300	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Nias Selatan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Nias Selatan	3
301	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Jakarta Selatan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Jakarta Selatan	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
302	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Pamekasan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Pamekasan	3
303	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Kepulauan Riau – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1
304	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kota Langsa – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kota Langsa	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
305	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Rokan Hilir – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Rokan Hilir	3
306	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kapuas – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kapuas	3
307	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Manggarai Barat – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Manggarai Barat	3
308	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Asmat – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Asmat	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
309	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bandung Barat – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bandung Barat	3
310	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Pasangkayu – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Pasangkayu	3
311	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Tebing Tinggi – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Tebing Tinggi	3
312	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Sukabumi 1 – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Sukabumi 1	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
313	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bojonegoro – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bojonegoro	3
314	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 HUKUM	Sekretariat Utama – Biro Umum dan Keuangan – Bagian Rumah Tangga Tata Usaha dan Protokol – Subbagian Rumah Tangga	5
315	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kota Tasikmalaya – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kota Tasikmalaya	3
316	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Papua Barat – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
317	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Karawang – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Karawang	3
318	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Sanggau – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Sanggau	3
319	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kota Sukabumi – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kota Sukabumi	3
320	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Pemalang – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Pemalang	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
321	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Lampung – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1
322	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bangka Barat – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bangka Barat	3
323	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Demak – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Demak	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
324	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kepulauan Tanimbar – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kepulauan Tanimbar	3
325	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kota Cirebon – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kota Cirebon	3
326	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Cianjur 1 – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Cianjur 1	3
327	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Pagar Alam – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Pagar Alam	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
328	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Papua Selatan – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1
329	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Aceh Tengah – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Aceh Tengah	3
330	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Wajo – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Wajo	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
331	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Tarakan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Tarakan	3
332	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 HUKUM | S-1 STATISTIKA | S-1 SISTEM INFORMASI	Inspektorat Utama – Inspektorat II	5
333	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kendal – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kendal	3
334	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kota Tegal – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kota Tegal	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
335	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Buton – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Buton	3
336	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bantul – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bantul	3
337	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Aceh Besar – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Aceh Besar	3
338	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Morowali Utara – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Morowali Utara	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
339	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Asahan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Asahan	3
340	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Barito Utara – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Barito Utara	3
341	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Maluku Tengah – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Maluku Tengah	3
342	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bekasi 1 – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bekasi 1	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
343	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Poso – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Poso	3
344	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kepulauan Siau Tagulandang Biaro – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	3
345	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kepulauan Talaud – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kepulauan Talaud	3
346	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Gresik – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Gresik	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
347	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Purbalingga – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Purbalingga	3
348	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 HUKUM | S-1 STATISTIKA | S-1 SISTEM INFORMASI	Inspektorat Utama – Inspektorat III	5
349	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Lebak – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Lebak	3
350	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bukittingi – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bukittingi	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
351	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Tolitoli – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Tolitoli	3
352	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Mimika – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Mimika	3
353	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Tojo Una Una – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Tojo Una Una	3
354	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Mahakam Ulu – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Mahakam Ulu	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
355	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Karo – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Karo	3
356	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kota Kediri – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kota Kediri	3
357	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Halmahera Utara – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Halmahera Utara	3
358	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Pandeglang – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Pandeglang	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
359	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Maluku – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3
360	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Deiyai – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Deiyai	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
361	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Kalimantan Timur – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3
362	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Papua Barat – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
363	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 MANAJEMEN LOGISTIK | S-1 STATISTIKA | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran – Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III	5
364	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kepulauan Yapen – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kepulauan Yapen	3
365	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Sumatera Barat – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
366	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Papua Tengah – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3
367	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Paniai – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Paniai	3
368	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Gunungkidul – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Gunungkidul	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
369	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Sabang – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Sabang	3
370	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Sulawesi Utara – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3
371	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Waropen – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Waropen	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
372	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Sorong Selatan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Sorong Selatan	3
373	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Lanny Jaya – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Lanny Jaya	3
374	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Karimun – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Karimun	3
375	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Merangin – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Merangin	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
376	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Sumedang – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Sumedang	3
377	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Tulang Bawang Barat – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Tulang Bawang Barat	3
378	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Gunungsitoli – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Gunungsitoli	3
379	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Banggai Kepulauan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Banggai Kepulauan	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
380	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN | S-1 STATISTIKA | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 SISTEM INFORMASI	Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola – Direktorat Sistem Pemenuhan Gizi	5
381	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Boven Digoel – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Boven Digoel	3
382	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Maluku Tenggara – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Maluku Tenggara	3
383	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Aceh Timur – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Aceh Timur	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
384	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Indragiri Hulu – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Indragiri Hulu	3
385	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Lombok Barat – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Lombok Barat	3
386	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Wonogiri – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Wonogiri	3
387	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 HUKUM	Sekretariat Utama – Biro Umum dan Keuangan – Bagian Rumah Tangga Tata Usaha dan Protokol – Subbagian Tata Usaha Dewan Pengarah	5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
388	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Prabumulih – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Prabumulih	3
389	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Ciamis – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Ciamis	3
390	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kota Surakarta – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kota Surakarta	3
391	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Nganjuk – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Nganjuk	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
392	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Tanggamus – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Tanggamus	3
393	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Garut 1 – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Garut 1	3
394	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Muko Muko – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Muko Muko	3
395	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Ternate – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Ternate	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
396	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kabupaten Serang – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kabupaten Serang	3
397	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Wakatobi – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Wakatobi	3
398	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kota Bogor – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kota Bogor	3
399	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Jayapura – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Jayapura	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
400	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Banjarbaru – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Banjarbaru	3
401	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Labuhanbatu – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Labuhanbatu	3
402	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Sumenep – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Sumenep	3
403	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Dumai – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Dumai	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
404	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Banyuasin – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Banyuasin	3
405	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Sampang – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Sampang	3
406	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Ogan Komering Ulu – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Ogan Komering Ulu	3
407	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Malinau – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Malinau	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
408	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bandung 2 – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bandung 2	3
409	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Natuna – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Natuna	3
410	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Seluma – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Seluma	3
411	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Pangkajene dan Kepulauan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Pangkajene dan Kepulauan	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
412	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Magetan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Magetan	3
413	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Sibolga – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Sibolga	3
414	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Belitung – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Belitung	3
415	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Buol – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Buol	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
416	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Aceh Barat Daya – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Aceh Barat Daya	3
417	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Lampung Utara – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Lampung Utara	3
418	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Pesisir Selatan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Pesisir Selatan	3
419	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Aceh Selatan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Aceh Selatan	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
420	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Toraja Utara – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Toraja Utara	3
421	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Hulu Sungai Selatan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Hulu Sungai Selatan	3
422	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kabupaten Kediri – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kabupaten Kediri	3
423	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bengkulu Utara – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bengkulu Utara	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
424	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Musi Banyuasin – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Musi Banyuasin	3
425	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Maros – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Maros	3
426	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bone – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bone	3
427	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Purwakarta – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Purwakarta	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
428	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Tanjungbalai – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Tanjungbalai	3
429	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Rembang – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Rembang	3
430	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Barito Selatan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Barito Selatan	3
431	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Puncak Jaya – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Puncak Jaya	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
432	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 MANAJEMEN | S-1 HUKUM | S-1 STATISTIKA | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan – Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I	5
433	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Halmahera Selatan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Halmahera Selatan	3
434	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Nduga – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Nduga	3
435	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Sidenreng Rappang – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Sidenreng Rappang	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
436	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Lombok Timur – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Lombok Timur	3
437	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kepulauan Anambas – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kepulauan Anambas	3
438	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Gowa – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Gowa	3
439	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Lumajang – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Lumajang	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
440	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kupang – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kupang	3
441	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Boyolali – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Boyolali	3
442	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Polewali Mandar – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Polewali Mandar	3
443	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Aceh Tenggara – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Aceh Tenggara	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
444	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Majene – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Majene	3
445	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Maluku Barat Daya – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Maluku Barat Daya	3
446	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Badung – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Badung	3
447	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kota Pekalongan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kota Pekalongan	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
448	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Pidie – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Pidie	3
449	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I D.I. Yogyakarta – Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1
450	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Ogan Ilir – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Ogan Ilir	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
451	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Tangerang Selatan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Tangerang Selatan	3
452	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Kalimantan Selatan – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3
453	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 HUKUM | S-1 STATISTIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 TEKNIK INFORMATIKA	Inspektorat Utama – Sekretariat Inspektorat Utama	5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
454	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Cimahi – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Cimahi	3
455	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Rejang Lebong – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Rejang Lebong	3
456	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Ngawi – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Ngawi	3
457	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kotawaringin Timur – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kotawaringin Timur	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
458	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Cilacap – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Cilacap	3
459	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Sigi – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Sigi	3
460	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Sarmi – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Sarmi	3
461	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Lhokseumawe – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Lhokseumawe	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
462	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bandung 1 – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bandung 1	3
463	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Raja Ampat – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Raja Ampat	3
464	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kota Malang – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kota Malang	3
465	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kota Banjar – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kota Banjar	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
466	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Papua – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3
467	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Lamongan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Lamongan	3
468	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Lahat – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Lahat	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
469	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Sumba Barat Daya – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Sumba Barat Daya	3
470	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Grobogan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Grobogan	3
471	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kepulauan Meranti – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kepulauan Meranti	3
472	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Payakumbuh – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Payakumbuh	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
473	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 HUKUM | D-IV MANAJEMEN ASET | S-1 MANAJEMEN LOGISTIK | S-1 TEKNIK SIPIL | S-1 ARSITEKTUR | S-1 TEKNIK INDUSTRI	Sekretariat Utama – Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang dan Jasa	10
474	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Klungkung – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Klungkung	3
475	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 HUKUM | S-1 STATISTIKA | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola – Direktorat Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi	5
476	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bengkulu Tengah – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bengkulu Tengah	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
477	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Buleleng – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Buleleng	3
478	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kutai Barat – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kutai Barat	3
479	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Lampung Selatan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Lampung Selatan	3
480	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Morowali – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Morowali	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
481	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Penajam Paser Utara – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Penajam Paser Utara	3
482	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Banyuwangi – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Banyuwangi	3
483	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kota Batu – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kota Batu	3
484	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Tolikara – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Tolikara	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
485	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Sumbawa – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Sumbawa	3
486	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bogor 4 – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bogor 4	3
487	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Bangka Tengah – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Bangka Tengah	3
488	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Maybrat – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Maybrat	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
489	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Nunukan – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Nunukan	3
490	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Donggala – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Donggala	3
491	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 MANAJEMEN | D-IV ANALIS KEUANGAN | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 STATISTIKA | D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	KPPG Kelas I Gorontalo – Bagian Umum dan Ketatausahaan	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
492	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Kota Bekasi – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Kota Bekasi	3
493	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 STATISTIKA | S-1 MATEMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GIZI | D-IV GIZI DAN DIETETIKA | S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KPPG Kelas I Bali – Bidang Layanan Pemenuhan Gizi	1
494	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 AKUNTANSI | D-IV AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI	KPPG Kelas II Palopo – Subbagian Tata Usaha KPPG Kelas II Palopo	3
495	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S-1 MANAJEMEN | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 AKUNTANSI | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK INDUSTRI | S-1 TEKNIK SIPIL | S-1 ARSITEKTUR | S-1 TEKNIK MESIN	Sekretariat Utama – Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang dan Jasa	5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
496	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM TATA NEGARA | S-1 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	Sekretariat Utama – Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	10
497	Perencana Ahli Pertama	S-1 ILMU EKONOMI | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 MANAJEMEN | S-1 STATISTIKA | S-1 AKUNTANSI | S-1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Utama – Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	7
498	Perencana Ahli Pertama	S-1 ILMU EKONOMI | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 MANAJEMEN | S-1 STATISTIKA | S-1 AKUNTANSI | S-1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan – Sekretariat Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan	7
499	Perencana Ahli Pertama	S-1 ILMU EKONOMI | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 MANAJEMEN | S-1 STATISTIKA | S-1 AKUNTANSI | S-1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola – Sekretariat Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola	7
500	Perencana Ahli Pertama	S-1 ILMU EKONOMI | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 MANAJEMEN | S-1 STATISTIKA | S-1 AKUNTANSI | S-1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Utama – Biro Manajemen Kinerja	18
501	Perencana Ahli Pertama	S-1 ILMU EKONOMI | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 MANAJEMEN | S-1 STATISTIKA | S-1 AKUNTANSI | S-1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Inspektorat Utama – Sekretariat Inspektorat Utama	7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
502	Perencana Ahli Pertama	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 AKUNTANSI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 MANAJEMEN | S-1 STATISTIKA | S-1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran – Sekretariat Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran	7
503	Perencana Ahli Pertama	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 AKUNTANSI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 MANAJEMEN | S-1 STATISTIKA | S-1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama – Sekretariat Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama	7
504	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 INFORMATIKA | D-IV INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | D-IV TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 TEKNIK KOMPUTER | D-IV TEKNIK KOMPUTER | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Sekretariat Utama – Biro Manajemen Kinerja	4
505	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 INFORMATIKA | D-IV INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | D-IV TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 TEKNIK KOMPUTER | D-IV TEKNIK KOMPUTER | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Sekretariat Utama – Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	4
506	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 INFORMATIKA | D-IV INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | D-IV TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 TEKNIK KOMPUTER | D-IV TEKNIK KOMPUTER | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Pusat Data dan Sistem Informasi	18
507	Pustakawan Ahli Pertama	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI | S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL	Sekretariat Utama – Biro Umum dan Keuangan	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI
508	Sandiman Ahli Pertama	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI | S-1 TEKNIK KOMPUTER | D-IV TEKNIK KOMPUTER | S-1 INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 TEKNIK ELEKTRO | S-1 REKAYASA KEAMANAN SIBER | D-IV INFORMATIKA | D-IV TEKNOLOGI INFORMASI	Pusat Data dan Sistem Informasi	1
509	Statistisi Ahli Pertama	S-1 MATEMATIKA | S-1 SAINS DATA | S-1 STATISTIKA	Pusat Data dan Sistem Informasi	8
	JUMLAH			**1.618**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).